

Sidoarjo

Jawa Pos METROPOLIS • SELASA 11 FEBRUARI TAHUN 2025 | HALAMAN 20

Operasi Keselamatan Semeru, Fokus Tekan Kecelakaan Jelang Lebaran

SIDOARJO – Polresta Sidoarjo menggelar apel pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2025 kemarin (10/2). Ratusan personel gabungan dikerahkan dalam operasi lalu lintas tersebut.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing menegaskan bahwa operasi tersebut mengutamakan pendekatan preemtif dan preventif. "Kami selalu melakukan sosialisasi terkait keselamatan berlalu lintas. Penggunaan kendaraan sesuai standar dan alat keselamatan juga terus kami tekankan," katanya.

Meski begitu, tindakan represif berupa penilangan, baik manual atau ETLE, tetap dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan. "Semua ini tentunya dalam rangka menekan angka kecelakaan," jelasnya.

Christian mengatakan, ada sejumlah hal yang menjadi perhatian, mulai tata cara ber-



ANGGUS BOKHANG/JAWA POS

kendara, kondisi saat berkendara, hingga usia pengendara. "Ada sepuluh sasaran yang akan dilakukan teguran dan penindakan nantinya," katanya.

Pt Bupati Sidoarjo Subandi yang turut hadir dalam apel mengapresiasi upaya kepolisian. Dia juga menyoroti faktor lain seperti cuaca ekstrem yang bisa meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. "Potensi bencana hidrometeorologi cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Ini tentu berdampak

pada pengendara," katanya. Selain cuaca, Subandi menyadari bahwa banyak jalan yang perlu perbaikan. Pihaknya terus berupaya mengantisipasi kecelakaan dengan memetakan jalan-jalan berlubang dan segera memperbaikinya. "Kita gerak bersama dengan Pak Kapolresta Sidoarjo agar keselamatan pengendara di jalan bisa terjamin," ungkapnya. (eza/fal)



PREEMTIF DAN PREVENTIF: Apel Operasi Keselamatan Semeru 2025 yang diikuti ratusan personel gabungan di Mapolresta Sidoarjo kemarin (10/2). Foto kiri, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing dan Ptt Bupati Sidoarjo Subandi meninjau kesiapan kendaraan petugas.

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

Lingkar Timur Diusulkan Diperlebar dan Dibeton

Jadi 20 Meter, Tidak Butuh Pembebasan Lahan

SIDOARJO – Jalan Lingkar Timur berperan mengalihkan kendaraan besar seperti truk agar tidak melewati area dalam kota. Jalan itu juga menjadi alternatif untuk perjalanan dari utara ke selatan Sidoarjo dan sebaliknya yang tidak melalui tol.

Sayang, kondisi Jalan Lingkar Timur kerap rusak. Terlebih, saat musim hujan. Lubang bermunculan di banyak titik sehingga membahayakan pengguna jalan. Chasanudin, warga Desa



TUTUP LUBANG: Pengaspalan oleh tim satgas jalan DPUBMSDA di Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo, kemarin (10/2).

Bluru Kidul, menuturkan, setiap musim hujan, hampir selalu ada bagian jalan di Lingkar Timur yang berubang. "Saya sempat melihat ada yang

terpeleset," katanya. Banyaknya kendaraan besar yang melintas menambah tingkat kerusakan. Saat ini kondisi jalan di sana terpan-

TENTANG JALAN LINGKAR TIMUR

- Status jalan milik Pemkab Sidoarjo.
- Total panjang 10.785 meter.
- Lebar jalan 12 meter.
- Penghubung dari wilayah Buduran hingga Candi dan sebaliknya.
- Mengalihkan kendaraan besar seperti truk agar tidak masuk area kota.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo

Terdiri atas dua ruas:

- 1 Ruas Candi-Prasung sepanjang 8.575 meter
- 2 Ruas Prasung-Banjjar Kemantren, Buduran, sepanjang 2.180 meter

tau rusak di beberapa titik imbas hujan deras beberapa waktu terakhir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, saat ini proses perbaikan dilakukan oleh tim satgas jalan. Dua tim sekaligus diterjunkan. Masing-masing berisi enam orang.

Satgas menyisir kerusakan dan langsung melakukan perbaikan menggunakan baby roller. "Ditambal ulang aspalnya yang rusak, sudah ditindaklanjuti," katanya.

Untuk solusi jangka panjang, jalan tersebut bakal dibeton dan dilebarkan. Perencanaan pembangunan sudah dilakukan. Rencananya, jalan diperlebar dari 12 meter menjadi

20 meter. Ada penambahan badan jalan di tiap sisi jalan.

Pelebaran tersebut direncanakan mengingat jalan tersebut menjadi salah satu akses utama kendaraan besar dan berat.

Usulan pelebaran jalan disampaikan ke pemerintah pusat sehingga menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pa-

salnya, pelebaran dan betonisasi akan cukup menguras anggaran apalagi menggunakan APBD. Mekanismenya bisa lewat dana Inpres Jalan Daerah (IJD) atau mekanisme lainnya. "Usulan kami sampaikan ke pemerintah pusat, sampai saat ini kami masih komunikasi terus-menerus," ujar Dwi kemarin (10/2).

Meski diusulkan dibangun pemerintah pusat, kata dia, kebutuhan lahannya sudah mencukupi. Artinya, tidak butuh pembebasan lahan. Lahan di samping jalan tersebut masih memadai untuk pelebaran sehingga hanya butuh dukungan pembiayaan fisik pembangunannya. (uzi/fal)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PERIZINAN

Layanan Jemput Bola Permudah Pelaku Usaha Dapat NIB

SIDOARJO – Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo mendorong pelaku usaha bisa mengurus perizinan. Selama 2024, sebanyak 1.507 nomor induk berusaha (NIB) berhasil diterbitkan, baik lewat



DPMPTSP SIDOARJO

Anita Inggit

layanan jemput bola perizinan maupun layanan lainnya.

Tahun ini layanan jemput bola kembali dilakukan. Selain itu, DPMPTSP Sidoarjo bersinergi dengan desa untuk langsung memberikan layanan perizinan ke desa.

Kabid Penanaman Modal DPMPTSP Sidoarjo Anita Inggit mengatakan, ada sinergi antara desa dan DPMPTSP. Misalnya, ketika desa memiliki agenda pameran, bisa mengundang DPMPTSP untuk memberikan layanan di sana. Bahkan, termasuk komunitas maupun perkumpulan. "Misalnya, Desa

Punggul beberapa waktu lalu memiliki agenda expo UMKM, kemudian bersurat ke kami untuk fasilitasi tim CS kami melaksanakan layanan perizinan di sana," katanya.

Dengan langkah tersebut, pelaku usaha lebih mudah mendapatkan NIB. "Karena punya usaha wajib ber-NIB," tegasnya.

Dia mengungkapkan, dari target 1.163 NIB, pihaknya berhasil merealisasikan penerbitan 1.507 NIB. Untuk tahun ini, DPMPTSP fokus pada program sosialisasi dengan target NIB terfasilitasi. (uzi/fal)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

RSUD Sibar Siapkan Layanan Cuci Darah

Bangun Gedung Hemodialisis, Gunakan Anggaran BLUD Rp 17 M

SIDOARJO – RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) akan membangun fasilitas layanan baru tahun ini. Salah satunya, gedung hemodialisis yang bisa melayani pasien yang membutuhkan cuci darah.

Direktur RSUD Sibar dr Abdillah Segaf Alhadad mengatakan, pembangunan gedung hemodialisis masih dalam tahap perencanaan di LPSE. Pemenang perencanaan diharapkan sudah ditetapkan akhir bulan ini. "Jika sesuai rencana, pembangunan bisa segera dimulai dalam waktu dekat," ujarnya kemarin (10/2).

Abdillah mengatakan, gedung hemodialisis bakal dibangun di sisi barat gedung utama dan akan dinamai gedung G. Gedung tersebut dirancang tiga lantai. Namun, pada tahap pertama akan difokuskan pada penyelesaian satu lantai terlebih dahulu agar layanan bisa segera beroperasi. "Insya Allah, sementara satu

lantai dulu yang kami upayakan. Tapi, nanti sambil melihat hasil tim perencana, bisa selesai berapa lantai," jelasnya.

Pembangunan gedung tersebut akan menggunakan anggaran dari BLUD sebesar Rp 17 miliar. "Alhamdulillah bisa bangun dengan biaya dari RSUD Sibar sendiri," katanya.

Abdillah mengungkapkan, selama ini pasien yang membutuhkan cuci darah dari wilayah Sidoarjo Barat, terutama Krian dan sekitarnya, harus dirujuk ke RSUD RT Notopuro untuk menjalani hemodialisis. Hal itu sering menjadi kendala karena jarak tempuh yang cukup jauh dan keterbatasan fasilitas di rumah sakit terdekat. "Dengan adanya gedung hemodialisis sendiri, layanan kesehatan bagi warga Sidoarjo Barat akan semakin lengkap dan lebih dekat," jelasnya.

Mantan kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sidoarjo itu berharap, pembangunan gedung hemodialisis bisa selesai tahun ini. "Kami upayakan ini bisa segera," tandasnya. (eza/fal)



Program Cek Kesehatan Gratis Diluncurkan, Zulkifli Hasan Ajak Warga Periksa Rutin



PELAYANAN: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan saat berbicara dengan salah satu pasien yang antri di Puskesmas Taman.

Dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara resmi memulai program cek kesehatan gratis. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berulang tahun sebagai upaya deteksi dini penyakit.

M Saiful Rohman,
Wartawan Radar Sidoarjo

MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengajak masyarakat

untuk memanfaatkan layanan kesehatan ini dengan baik. "Satu sehat, semua sehat dengan cek kesehatan gratis. Karena apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati," ucapnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Senin (10/2). Dia menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Banyak orang merasa sehat tetapi tidak menyadari kondisi kesehatannya tanpa pemeriksaan rutin. "Namanya orang kan ngak tahu, makanya perlu dicek. Dengan dicek, kita jadi tahu, dan dengan

● Ke Halaman 1

Program Cek Kesehatan...

tahu, kita bisa mencegah," ujarnya. Menurutnya, jatuh sakit secara tiba-tiba dapat mengganggu produktivitas dan mengurangi penghasilan seseorang. Oleh karena itu, melalui program ini, ia berharap masyarakat berbondong-bon-

dong memeriksakan kesehatannya.

"Tadi saya bertemu ibu-ibu hamil, dan pemeriksaan ini penting. Pemenuhan gizi serta asupan makanan yang baik dapat mencegah stunting, yang jika sudah terjadi tidak bisa disembuhkan," jelasnya.

"Stunting hanya bisa dicegah sejak

masa kehamilan. Oleh karena itu, ibu hamil harus mengonsumsi makanan bergizi, seperti protein, karbohidrat, buah, sayur, dan susu," tambahnya.

Dalam pelaksanaan program ini, warga yang sakit akan segera ditangani. Jika membutuhkan perawatan lebih lanjut, mereka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Plt Kepala Puskesmas Taman, dr. Linda Megasari, menyampaikan bahwa kuota pemeriksaan gratis dibatasi 30 orang per hari, sesuai arahan dari Kemenkes.

"Tenaga medis di Puskesmas Taman cukup memadai untuk melaksanakan program ini. Saat ini, kami memiliki 13 dokter yang siap melayani masy-

arakat dengan baik," terangnya.

Hingga saat ini, tidak ada kendala dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Kemenkes juga terus memberikan dukungan agar program berjalan lancar. "Petugas kesehatan di lapangan sudah sangat siap untuk melakukan pengecekan kesehatan gratis, pungkasnya. (saivga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PERSIAPAN: Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dan Plt Bupati Sidoarjo Subandi mengecek kesiapan kendaraan untuk Operasi Keselamatan Semeru 2025.

Minimalisir Kecelakaan, Polresta Gelar Operasi Keselamatan Semeru

KOTA-Polresta Sidoarjo menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2025 mulai 10 hingga 23 Februari mendatang. Dalam operasi kali ini, kepolisian lebih mengedepankan penindakan secara preventif dan pre-emptif. Apel persiapan dilaksanakan di halaman Polresta Sidoarjo pada Senin (10/2) pagi.

Dalam Operasi Keselamatan Semeru kali ini, 80 persen ke-

giatan difokuskan pada langkah pre-emptif dan preventif, sementara sisanya dilakukan secara represif oleh Satlantas Polresta Sidoarjo.

"Penindakan tegas akan dilakukan terhadap pelanggaran kasat mata yang berpotensi menyebabkan fatalitas di jalan," ungkap Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing.

Adapun sasaran penindakan

dalam operasi kali ini meliputi, pelanggaran boncengan lebih dari satu orang, pengendara di bawah umur, berkendara dengan kecepatan melebihi batas, pengemudi mobil yang tidak mengenakan sabuk pengaman, berkendara sambil menggunakan handphone (HP), berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus lalu lintas.

● Ke Halaman 10

CS Dipindai dengan CamScanner



Minimalisir Kecelakaan,...

menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi (brong), menerobos lampu lalu lintas (traffic light) dan berkendara tanpa mengenakan helm atau menggunakan helm yang tidak sesuai standar.

Kapolresta menambahkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian nomor tiga di Indonesia setelah penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, selama operasi berlangsung, petugas akan mengede-

pankan tindakan persuasif dalam menindak pelanggaran.

Ia berharap, Operasi Keselamatan Semeru 2025 dapat menciptakan kondisi yang lebih aman menjelang Hari Raya Idulfitri. Sebanyak 307 personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemkab Sidoarjo diterjunkan dalam operasi ini.

"Kami berharap masyarakat menaati peraturan dan tertib berlalu lintas serta menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi yang ditentukan," pungkasnya. (gun/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner



Radarsidoarjo

RADAR SIDOARJO | SELASA, 11 FEBRUARI 2025 | HALAMAN 10

Angin Puting Beliung Terjang Jabon, Satu Musala Rusak Parah



GOTONG ROYONG: Para warga membersihkan serpihan kanopi yang bertebaran di jalan.

JABON-Angin puting beliung melanda Desa Pangreh pada Minggu (9/2). Peristiwa ini menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan, termasuk fasilitas umum dan rumah warga.

Dampak terparah terjadi pada sebuah musala, di mana kanopi bangunan terbawa angin kencang hingga terlempar ke SDN 1 Pangreh yang berjarak beberapa meter dari lokasi.

Selain mushola, satu rumah warga juga mengalami kerusakan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, meskipun beberapa warga sempat panik dan mencari tempat perlindungan.

Salah seorang warga, Nur Asia, mengaku panik saat kejadian berlangsung. Namun, ia bersyukur karena tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.

"Alhamdulillah, meskipun angin kencang merusak rumah dan mushola, tidak ada korban," ujarnya.

Menurutnya, angin datang secara tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu singkat. Namun, hembusannya sangat kuat hingga menerbangkan atap bangunan. "Banyak puing-puing bangunan yang terbang, anginnya memang sangat kencang," jelasnya.

Pasca kejadian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo langsung turun ke lokasi. Mereka membantu warga membersihkan puing-puing serta mendata kerusakan akibat angin puting beliung. (sai/vga)

CS
Dipindai dengan CamScanner

SELASA, 11 FEBRUARI 2025

Menko Zulhas: Cegah Penyakit dengan Manfaatkan CKG

SIDOARJO (BM) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat untuk bisa memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan oleh pemerintah dengan baik dalam upaya untuk mencegah penyakit yang tidak terdeteksi.

"Mencegah itu lebih baik dari mengobati, jadi kami minta agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan baik," kata Zulkifli saat meninjau ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Taman, Sidoarjo, Senin (10/2).

Menurut Zulkifli, program yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut menyasar semua kalangan berbagai kategori usia.

Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli menekankan masyarakat perlu secara rutin untuk melakukan

pengecekan kesehatan agar tetap bisa menjaga kondisi tubuh yang prima.

Ia menegaskan, bagi masyarakat kategori usia produktif, diharapkan juga bisa memanfaatkan program tersebut agar ketika kondisi kesehatan menurun dan tidak terdeteksi, bisa diketahui lebih dini dan tidak mengganggu produktivitas.

"Jangan sampai tiba-tiba sakit, tidak bisa bekerja, tidak produktif malah keluar uang untuk pengobatan," tegas Zulkifli.

Ia berharap dengan langkah deteksi dini melalui program CKG ini, masyarakat bisa semakin peduli dan waspada akan kesehatan masing-masing dan bisa merubah pola hidup menjadi lebih sehat.

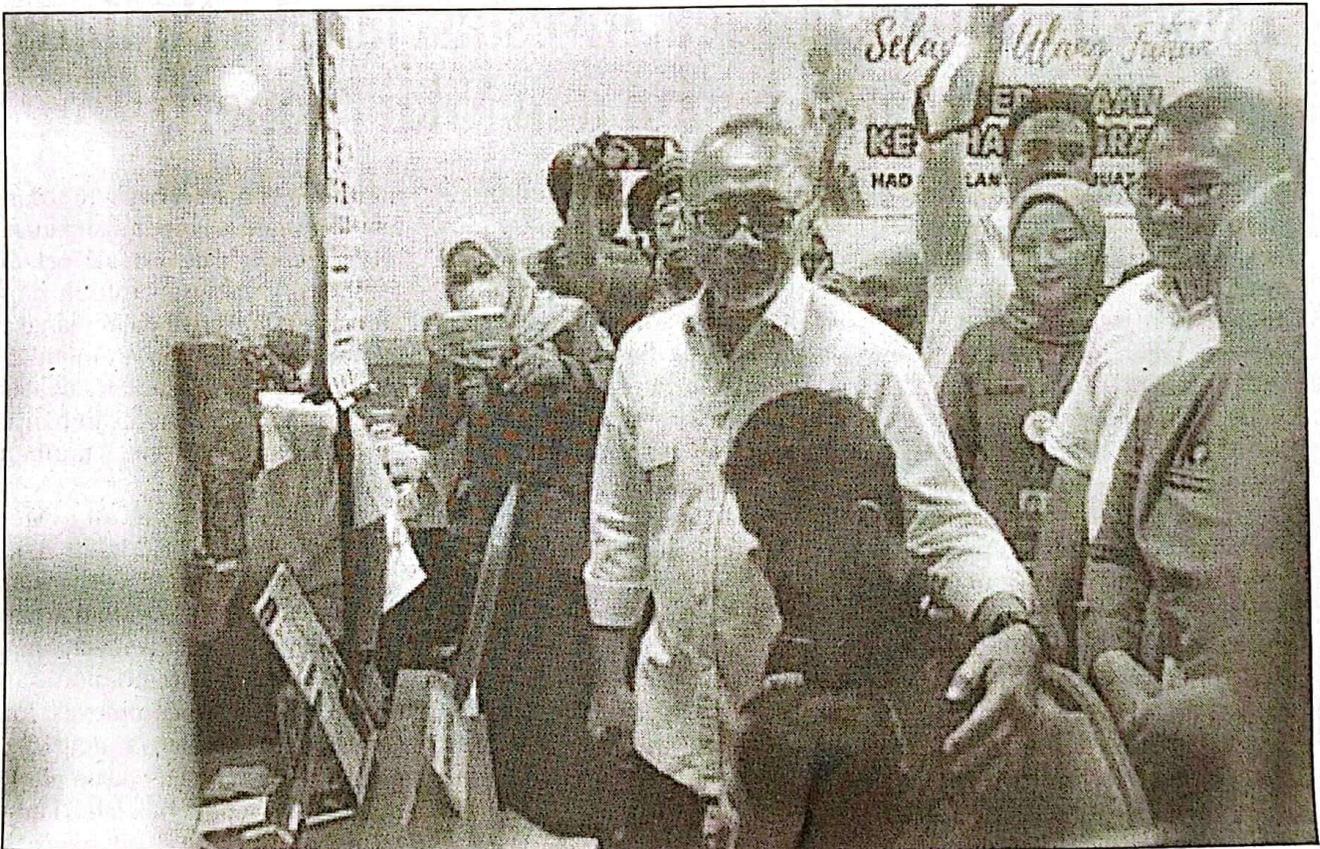
Zulkifli menjelaskan program CKG tersebut sudah dilaksanakan serentak di berbagai kota di Indonesia

mulai Senin (10/2), dan saat ini juga disiapkan khusus bagi warga yang berulang tahun sebagai hadiah dari pemerintah.

Ke depannya pemerintah secara bertahap akan melaksanakan program CKG ini bagi semua kalangan termasuk bagi siswa yang rencananya akan berjalan pada Juli mendatang.

Menurut website resmi Kementerian Kesehatan, program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, dengan fokus utama pada tiga sasaran yakni CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus untuk ibu hamil dan balita.

CKG ulang tahun menyediakan layanan pemeriksaan untuk anak usia 0-6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan di Puskesmas dan klinik yang telah bekerja sama. (udi)



BMIST



BM/ST

BERSIHKAN SUNGAI: Pemkab Sidoarjo komitmen mencegah banjir dengan menggalakkan program Jihad Rawat Kali yang dilakukan setiap minggunya bersama pemerintah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo dan warga setempat.

Pemkab Antisipasi Banjir Lewat Program Rawat Kali

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan komitmen dalam mencegah banjir dengan menggalakkan program Jihad Rawat Kali yang dilakukan setiap minggunya bersama pemerintah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo dan warga setempat.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat harus terus bergotong royong dalam membersihkan sampah, lumpur, serta material lain yang dapat menghambat aliran air sungai demi mencegah terjadinya banjir di Sidoarjo.

"Kami ingin sungai di Sidoarjo kembali bersih dan berfungsi dengan baik untuk mengalirkan air, mengurangi risiko banjir, serta meningkat-

kan kualitas lingkungan sekitar. Ini adalah upaya dan komitmen bersama yang harus terus kita galakkan," kata Subandi dalam keterangannya di Sidoarjo, Minggu (9/2).

Dalam kegiatan bersih-bersih sungai di Sungai Desa Klurak, Kecamatan Candi, Sidoarjo ini, Subandi menilai aksi ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk mencegah banjir, menjaga kebersihan lingkungan, serta melestarikan sungai.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan hingga menjelang bulan Ramadan. Selain aksi Jihad Rawat Kali, Pemkab Sidoarjo juga akan terus melakukan pemeliharaan sungai agar kebersihannya tetap terjaga. Selain itu pengerukan dasar sungai untuk menghilangkan endapan lumpur juga akan dilakukan pemerintah

melalui dinas terkait.

"Kami tidak hanya melakukan pembersihan, tetapi juga terus melakukan pemeliharaan dengan berkoordinasi dengan camat dan lurah setempat serta dinas-dinas terkait," katanya.

Subandi juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Ia mengajak warga untuk tidak membuang sampah sembarangan serta berpartisipasi dalam kegiatan Jihad Rawat Kali yang akan terus digalakkan di berbagai titik di Sidoarjo.

"Kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan. Jadi, bukan hanya pemerintah yang berperan aktif, tetapi juga diperlukan dukungan nyata dari masyarakat," kata Subandi. (udi)



Kadiskominfo Sidoarjo Noer Rochmawati hadir tasyakuran HPN 2025 PWI Sidoarjo, Senin (10/2).

PWI Sidoarjo Tasyakuran HPN 2025

Komitmen Jaga Profesionalisme Pers

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo menggelar tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sekaligus merayakan HUT ke-79 PWI, di Balai Wartawan Sidoarjo, Senin (10/2).

Acara ini dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadis Kominfo) Sidoarjo, Noer Rochmawati, didampingi Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Muhammad Wildan serta Kasi Humas Polresta Sidoarjo, Iptu Tri Novi Handono.

Selain itu, puluhan wartawan dari berbagai media di Sidoarjo juga turut hadir, menikmati kebersamaan sambil

berbincang santai.

Ketua PWI Sidoarjo, Mustain, mengatakan HPN ini menjadi momen refleksi bagi para insan pers agar semakin profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik.

"Kami ingin PWI Sidoarjo bisa terus memberikan kontribusi positif untuk kemajuan daerah," tandasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan HPN 2025, PWI Sidoarjo juga akan menggelar bakti sosial (Baksos) pengobatan gratis pada 20 Februari 2025 dan turnamen E-sport tingkat SMA pada 26 Februari 2025.

Kadis Kominfo Noer Rochmawati yang hadir mewakili Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, mene-

gaskan pers adalah pilar penting demokrasi yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

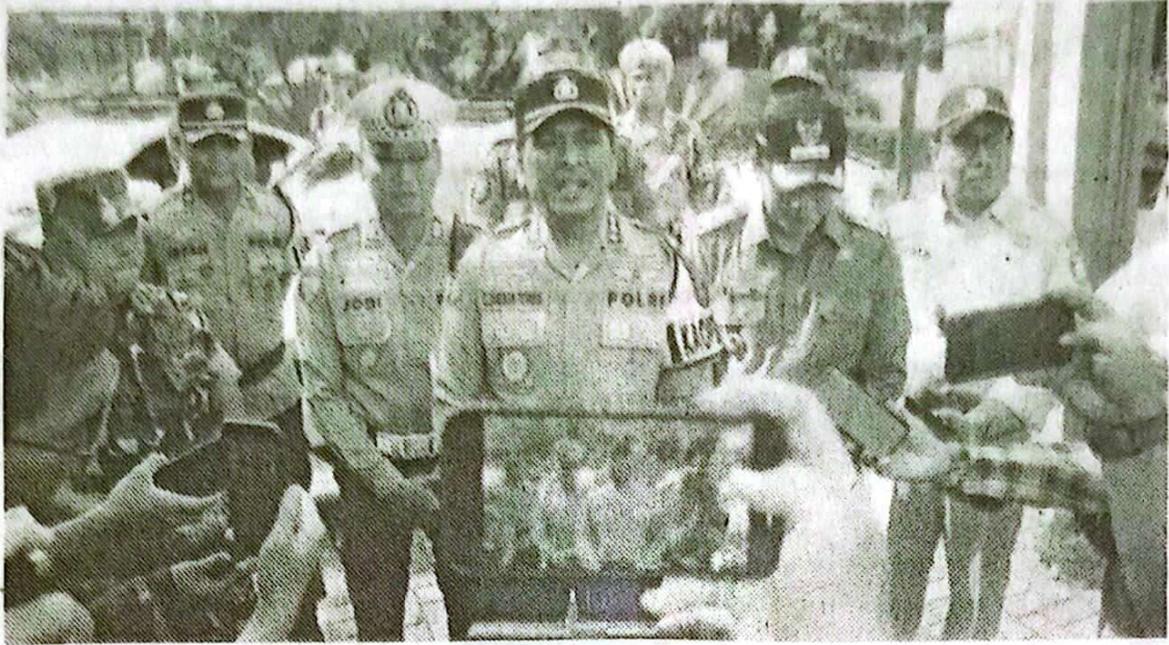
"Di era informasi yang bergerak cepat, wartawan harus semakin profesional dan bertanggung jawab dalam menyampaikan berita," ujarnya.

Noer juga menegaskan Pemkab Sidoarjo berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan berharap insan pers bisa memberitakan dengan berimbang agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan mencerahkan. "Semoga sinergi antara pers dan pemerintah terus berjalan dengan baik," harap Noer Rochmawati. (sta/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2025 di Mako Polresta Sidoarjo.

Polresta Sidoarjo Gelar Operasi Keselamatan Semeru

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Satlantas Polresta Sidoarjo dan jajaran menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2025, mulai 10 Februari sampai dengan 23 Februari 2025. Pelaksanaan operasi secara serentak menjelang Ramadhan dan Idul Fitri ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) bagi masyarakat.

Disampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing dalam apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2025 di Mako Polresta Sidoarjo, Senin 10 Februari 2025, guna menekan terjadinya fatalitas di jalan raya diperlukan membangun budaya tertib berlalu lintas bagi masyarakat.

“Budaya tertib berlalu lintas harus kita wujudkan dengan memperhatikan faktor-faktor keselamatan diri kita dan orang lain saat di jalan raya. Yaitu dengan menumbuhkan perilaku berkendara yang baik serta mematuhi peraturan tertib berlalu lintas,” jelas Kapolresta Sidoarjo.

Oleh sebab itu, Kepolisian perlu menggandeng semua pihak atau stakeholder terkait untuk membangun budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Keselamatan masyarakat

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Rujukan dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

menjadi prioritas dalam program Operasi Keselamatan Semeru 2025. Tentunya dengan mengedepankan tindakan

yang bersifat edukatif, humanis dan profesional. (ca/rus)

CS Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
BANGSA
Koran Warga, Jati



Apel gelar pasukan operasi Semeru 2025 di Mapolresta Sidoarjo Senin (10/2/25)

LOETF/DUTA

Plt. Bupati dan Kapolresta Ajak Warga Tertib Berlalu Lintas

SIDOARJO - Operasi Kepolisian Kewilayahan Keselamatan Semeru 2025 resmi dimulai pada Senin, 10 Februari 2025. Selama 14 hari ke depan, operasi ini akan mengintensifkan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2025 digelar oleh Polresta Sidoarjo di halaman kantornya pada Senin (10/2/25). Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi menyatakan dukungannya terhadap program ini dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang Idulfitri 1446 H Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa tertib berlalu lintas harus selalu dipatuhi, tidak hanya demi keselamatan diri sendiri, tetapi juga demi keselamatan pengguna jalan lainnya.

"Saat berkendara, kita harus mematuhi aturan lalu lintas, seperti memakai helm dan tidak ber-

boncengan lebih dari dua orang. Jika aturan ini diikuti, insyaallah keselamatan di jalan akan lebih terjaga,"ujarnya.

Subandi juga mengimbau warga Sidoarjo untuk melengkapi surat-surat berkendara, terutama SIM yang wajib dibawa saat mengemudi. Ia menegaskan bahwa mereka yang belum memiliki SIM sebaiknya tidak berkendara dan segera mengurusnya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Bagi anak-anak kita yang belum memiliki SIM, tentunya jangan mengendarai sepeda motor," pesannya.

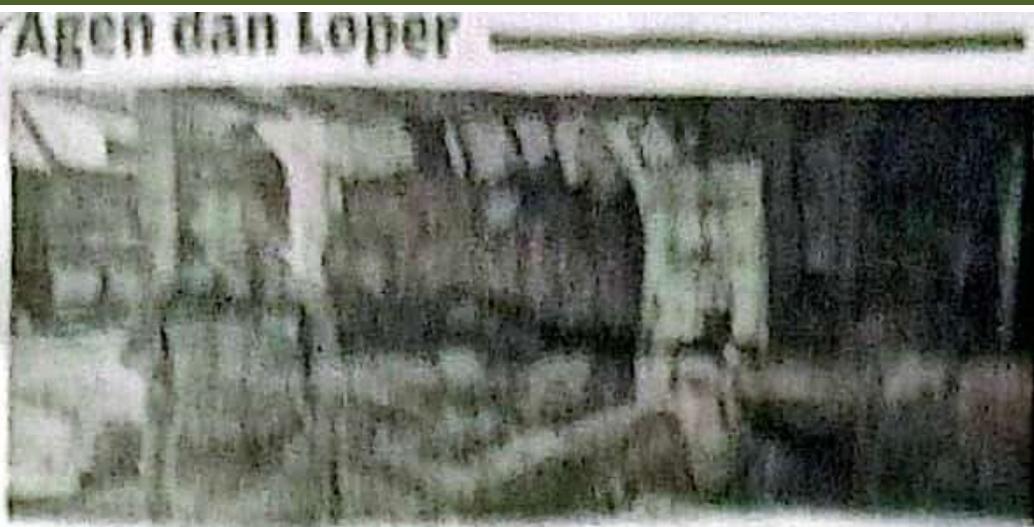
Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, menyampaikan bahwa dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025, sebanyak 307 personel gabungan diterjunkan di Kabupaten Sidoarjo. Selain melibatkan Polresta Sidoarjo, operasi ini juga mendapat dukungan dari Kodim 0816 Sidoarjo, Satpol PP

Sidoarjo, serta Dinas Perhubungan Sidoarjo. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaannya.

"Kami akan lebih mengedepankan upaya preventif dan preemtif, yang mencakup 80 persen dari total kegiatan. Langkah represif tetap dilakukan, tetapi menjadi opsi terakhir," jelasnya.

Kapolresta menambahkan bahwa sosialisasi keselamatan berlalu lintas akan terus digencarkan selama operasi berlangsung. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Mengingat tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Sidoarjo, diharapkan operasi ini dapat menekan jumlah insiden yang terjadi.

"Hindari penggunaan knalpot brong dan selalu pakai helm berstandar SNI. Ini semua demi keselamatan kita bersama,"pungkasnya. • Loe



Pak Eko Santoso bersama istri dan Nur Hadi looper koran berdiri di depan kios milik Pak Eko.

Ribet Tagih di Kecamatan Porong

SIDOARJO - Birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang terkesan rumit masih ditemui. Kali ini, keluhan datang terkait mekanisme (prosedur) pembayaran yang dirasakan memberatkan agen koran (kios) dan looper. Proses penagihan uang langganan koran sebesar Rp 150 ribu dianggap ribet karena mengharuskan pemilik NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan nomor rekening.

Nur Hadi (46), seorang looper koran, mengaku kesulitan menagih uang di Kecamatan Porong yang tidak bisa diambil karena harus memiliki NPWP. "Dengan nilai tagihan Rp 150 ribu, kami diminta NPWP di Kecamatan Porong, serta nomor rekening. Saya tidak punya NPWP dan itu terasa ribet bagi saya," ujar Nur Hadi.

"Harapannya, jangan terlalu ribet seperti ini. Tolong buat prosesnya lebih mudah, supaya bisa langsung dibayar," harap Pak Nur Hadi.

Terpisah Eko Santoso (47), agen koran di Porong yang sudah puluhan tahun berjualan, mengungkapkan bahwa pemerintah harus turun tangan terkait masalah ini.

“Kalau besar nilainya, ya tidak masalah. Tapi ini kan hanya Rp 150 ribu, minimal pajak itu dikenakan pada tagihan yang lebih dari Rp 250 ribu. Ini kan koran, keuntungannya berapa? Kalau dikenakan pajak begitu, kami, looper, harus menanggung biaya makan dan bensin, kan sangat memberatkan,” ungkap Eko Santoso saat dikonfirmasi ulang Senin (10/2/25) hingga berita ini ditayangkan di Harian Duta Masyarakat tagihan belum terbayarkan.

Makanya, saya memohon kepada pemerintah pusat, provinsi, atau Kabupaten/Kota untuk meninjau kembali kebijakan ini.

“Pemerintah pusat, kementerian, dan Pemkab harus lebih sederhana dalam membuat kebijakan dan proses pembayaran yang tidak ribet. Karena kami ini orang kecil,” pungkas Pak Eko Santoso, agen koran Jawa Pos, Duta Masyarakat, dan lainnya di Porong.

Terpisah Bendahara Kecamatan Porong dikonfirmasi dikantor Kecamatan mengatakan, syarat untuk pencairan memang harus memiliki NPWP, dan juga harus memasukkan nama (data) serta nomor rekening.

“Untuk Kecamatan Porong, tagihan bulan Januari yang cair dan saya masukan disini, ini tagihan nota koran dengan nomor.... dan saya sudah masukan di sini untuk tagihan nota koran, Muslik juga mengatakan saya tidak mau diperintah dengan nada tinggi ke wartawan,” ujar Muslik, bendahara Kec. Porong.

Syarat untuk pencairan harus memiliki NPWP, dan juga di sini harus saya masukan nama juga nomor rekening. Untuk kecamatan Porong yang bulan Januari, yang cair dan saya masukan di sini ini tagihan nota koran dengan nomor....., cuma yang saya minta sampean urus untuk bulan Februari di Sidoarjo tidak iwuh (tidak sulit),” kata Muslik menjelaskan yang disampaikan ke Nur Hadi saat menagih. ● Loe



Dipindai dengan CamScanner

DUTA

SÉLASA WAGE, 11 FEBRUARI 2025

KEPALA BIRO: BUDI JOKO SANTOSO. WARTAWAN: Kristion. PEMASARAN/IKLAN: ANI MAULANA, JURNALIS: RITONO. TELEPON/SMS REDAKSI/IKLAN BIRO SIDOARJO: 083-



Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing memberikan penjelasan kepada Plt Bupati Subandi tentang petugas gabungan dari linmas yang dilibatkan dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025.

Polresta Sidoarjo Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2025 Demi Wujudkan Budaya Tertib di Jalan

Sidoarjo, Memorandum

Sat Lantas Polresta Sidoarjo dan jajaran menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2025. Program yang digelar mulai 10-23 Februari ini, bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kam-seltibcarlantas) bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing ketika memimpin apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2025 di di mapolres, Senin (10/2). Salah satu misi utamanya, menekan angka fatalitas di jalan raya. Se-

hingga diperlukan membangun budaya tertib berlalu lintas bagi masyarakat.

"Budaya tertib berlalu lintas harus kita wujudkan dengan memperhatikan faktor-faktor keselamatan diri kita dan orang lain saat di jalan raya. Yaitu den-

gan menumbuhkan perilaku berkendara yang baik serta mematuhi peraturan tertib berlalu lintas," jelas Christian Tobing.

Oleh sebab itu, kepolisian perlu menggandeng *stakeholder* terkait untuk membangun budaya itu secara bersama-sama. Apalagi, keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam program Operasi Keselamatan Semeru 2025. "Tentunya dengan mengedepankan tindakan yang bersifat edukatif, humanis, dan profesional," sebutnya. (kri/jok/epe)

TARGET OPERASI PRIORITAS:

1. Berboncengan lebih dari satu orang.
2. Melawan arus.
3. Melebihi batas kecepatan berkendara.
5. Menerobos lampu merah.
6. Pengendara masih bawah umur.
7. Pengendara dalam pengaruh alkohol.
8. Pemotor tidak memakai helm SNI.
9. Knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
10. Berkendara sambil menggunakan *handphone*.
11. Pengemudi roda empat tidak memakai *safety belt*.

Sumber: Polresta Sidoarjo

CS Dipindai dengan CamScanner

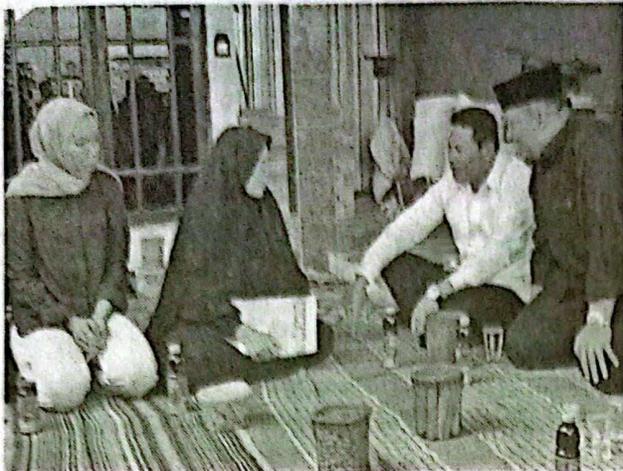
MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kabupaten Sidoarjo periode 2023-2026



Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, didampingi Ketua umum Baznas Sidoarjo dan Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sidoarjo, takziah ke rumah duka, siswa SMAN 1 Porong, korban kecelakaan di jalan TOL saat ODL



Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, didampingi asisten tata pemerintahan dan kesra serta Ketua umum Basnaz Sidoarjo menyerahkan santunan kepada keluarga siswa SMAN 1 Porong korban kecelakaan saat ODL

Plt Bupati Sidoarjo Terbitkan Surat Edaran Tentang Kegiatan ODL di Sekolah Sekolah Wajib Lakukan ODL di Wilayah Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE), terkait aturan pelaksanaan Out Door Learning (ODL) pada sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Surat Edaran bernomor 400.3/1308/438.5.1/2025, yang diterbitkan pada 3 Februari 2025 itu, ditujukan kepada seluruh sekolah baik negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Sekolah di Sidoarjo wajib melaksanakan SE tersebut. Mereka harus menanggihkan kegiatan ODL di luar wilayah kabupaten Sidoarjo, hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Surat edaran ini mencakup jenjang PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, hingga pendidikan nonformal di Kabupaten Sidoarjo.

"Surat Edaran ini kita buat, demi memastikan keselamatan peserta didik di Kabupaten Sidoarjo ketika melakukan ODL," kata Subandi, belum lama ini.

Dalam SE tersebut, jelas Subandi, ada beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh sekolah dalam melaksanakan kegiatan ODL.

Pertama, jenis ODL. ODL yang diatur dalam SE ini mencakup berbagai

aktivitas seperti studi lapangan, perkemahan, tinggal bersama masyarakat, karya wisata, magang, belajar di alam terbuka, hingga perpindahan sekolah.

Kedua, ODL dibatasi ODL hanya boleh dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan yang direncanakan di luar daerah wajib ditanggihkan.

Ketiga, persyaratan administrative, Sekolah yang ingin mengadakan ODL wajib mengajukan proposal paling lambat dua minggu sebelum keberangkatan.

Selain itu, harus menyertakan surat permohonan serta dokumen kelayakan kendaraan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo.

"Dan keempat, Faktor Keselamatan menjadi Prioritas Utama," tegasnya.

Keputusan menerbitkan Surat Edaran ini, diakui oleh Subandi, tidak lepas dari rentetan musibah yang menimpa pelajar dalam kegiatan ODL.

Dirinya menyebut, pada akhir Januari 2025, tragedi kegiatan ODL menimpa murid SMPN 7 Mojokerto yang hanyut di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta, menyebabkan empat siswa meninggal, termasuk satu anak asal Kecamatan Krian, Sidoarjo.

Tak berselang lama, pada 1 Februari 2025, kecelakaan bus di Tol Pandaan-Malang merenggut nyawa seorang siswi SMAN 1 Porong.

"Dua peristiwa memilukan ini membuat saya harus perlu bertindak cepat untuk mencegah kejadian serupa agar tidak terulang. Kami ingin memastikan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak-anak. Kami tidak ingin ada korban lagi," tegas Subandi, belum lama ini.

Surat edaran yang diterbitkan, kata Subandi, berlaku hingga ada kebijakan baru yang menggantikan. Meskipun demikian, seluruh satuan pendidikan di Sidoarjo juga agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap peserta didiknya.

"Saya berharap dengan SE yang kita terbitkan, kegiatan ODL akan bisa menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan tanpa mengorbankan keselamatan para siswa," pungkasnya. n [kus.adv]

CS Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
Bhirawa

Wahai Rakyat Sidoarjo

Kolaborasi Media, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan Sosialisasikan Pengendalian Kependudukan Masyarakat

by **ZonaJatim00** — 10 Februari 2025 in advertorial

0



0 SHARES / 16 VIEWS

Share on Facebook

Share on Twitter



Zonajatim.com, Sidoarjo – Menjalinkan kolaborasi bersama wartawan, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (PPPA dan KB), memberikan sosialisasi pengendalian kependudukan masyarakat kepada awak media Sidoarjo bertempat di Hotel Aston Inn Batu Malang Selasa-Rabu (21-22/1/2025).

Kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam Bimtek berkaitan dengan pengendalian penduduk Sidoarjo diikuti puluhan wartawan dari berbagai organisasi wartawan di Sidoarjo dengan nara sumber dari Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan SH, serta Kepala PPPA dan KB Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani SPd, MM.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Kayan SH menyampaikan kepada awak media pada acara Bimtek untuk tetap selalu melakukan kritik sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Sidoarjo, agar kedepannya bisa lebih baik lagi demi kemajuan warga Sidoarjo.

"Kami anggota Dewan selalu menerima masukan dari berbagai pihak termasuk dari rekan wartawan untuk kemajuan Sidoarjo, sekarang sudah tidak ada lagi kepentingan politik, karena semua sudah berakhir, Pileq anggota Dewan maupun Pilkada Bupati dan Wakil Bupati selesai, mari kita dukung Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, mari kita bersatu," ungkap Kayan SH.

Menurut H. Kayan, yang juga merupakan legislator dari Partai Gerindra, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta melibatkan 90 awak media dari berbagai organisasi wartawan di Sidoarjo yakni PWI, Forwas, AJS, Joss.

Ia berharap kegiatan serupa dapat diinisiasi oleh anggota DPRD lainnya bersama OPD terkait. H Kayan dalam kegiatan sosialisasi pengendalian kependudukan masyarakat mengajak media untuk



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ia berharap kegiatan serupa dapat diinisiasi oleh anggota DPRD lainnya bersama OPD terkait. H Kayan dalam kegiatan sosialisasi pengendalian kependudukan masyarakat mengajak media untuk turut serta dalam pengendalian kependudukan terutama menekan angka stunting di Sidoarjo. "Kami mengharapkan sinergitas dengan media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menekan angka stunting sehingga kesehatan anak menjadi lebih baik lagi," katanya.

Lebih lanjut Kayan, menyoroti perkembangan tingkat kelahiran di Kabupaten Sidoarjo, yang mengalami penurunan signifikan dari 15,2% pada tahun 2002 menjadi 8,4% pada tahun 2023. Ia menegaskan bahwa perubahan ini merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan, khususnya dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait program keluarga berencana.

Ia mendorong agar Pemkab bisa fokus dalam penanganan stunting. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga hal tersebut mestinya mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah. "Ya untuk apa APBD tinggi, kalau anak-anak kurang gizi, tidak berguna itu berarti," ucapnya.



Wakil Ketua DPRD H Kayan dan perwakilan media

H Kayan menuturkan bahwa pencegahan terjadinya stunting bukan hanya dengan memakan nasi dan telur saja. Melainkan ada beberapa faktor diantaranya pernikahan dini dan kondisi ekonomi rumah tangga sehingga saat bayi berada dalam kandungan tidak mendapatkan nutrisi yang baik. "Kondisi ekonomi rumah tangga, contohnya suaminya pengangguran, bisa jadi itu stunting. Karena setiap hari dari hamil, makannya mie terus, tidak ada gizinya sama sekali," jelasnya.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Menurutnya, harus ada edukasi positif yang dibangun oleh media dan Pemkab kepada masyarakat agar dapat menekan angka stunting secara bersama-sama. Terlebih masalah krusial yang harus dicegah adalah pernikahan dini, dan menurutnya ini sangat berpengaruh. Di mana, remaja yang sebetulnya belum siap hamil, namun terlanjur hamil.

Tak hanya orang tua, Kayan Kembali menegaskan bahwa kenakalan remaja, pernikahan dini, hingga stunting ini menjadi masalah yang harus diselesaikan semua pihak. Ia meminta pemerintah agar dalam membuat program penurunan angka penderita stunting tidak hanya seremonial saja.



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan bersama DPPPAKB

Namun program tersebut harus terprogram dan terorganisasi dalam waktu panjang, sehingga masyarakat memahami tindaklanjut yang harus dilakukan usai diberi sosialisasi pencegahan stunting. "Ibunya pusing, tidak siap melahirkan, kemudian anaknya tidak terurus, suaminya pengangguran, inilah pentingnya kita berkolaborasi dengan media guna memberikan edukasi ke masyarakat tentang dampak pernikahan dini," tegasnya.

Lebih lanjut Kayan menjelaskan, seharusnya stunting bukan hanya program saja yang hanya seremonial saja. Mengingat pencegahan penderita stunting pada bayi membutuhkan waktu panjang. "Stunting bukan hanya program saja. Misal ada program stunting, ada. Apa itu, pemberian makanan tambahan. Tetapi tidak hanya sebatas itu, dan butuh waktu panjang," ujar Kayan.

Politisi asal Partai Gerindra itu menjelaskan, hal yang penting adalah merubah mindset masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi tinggi. Mengingat selama ini pola pikir masyarakat adalah makanan yang mahal pasti mengandung gizi tinggi.

Untuk itu, dibutuhkan suatu kegiatan yang terprogram dan terorganisasi dalam waktu panjang. Kegiatan ini untuk memberi pemahaman makanan-makanan yang mengandung gizi tinggi kepada ibu hamil, namun mudah didapat dan tidak mahal. "Kita harus bisa merubah, yang dipikir dulu adalah budaya masyarakat yang ingin memperbaiki gizi anak-anak, dan memberi ilmu soal makanan yang didapat sehari-hari tapi nilai gizinya tinggi. Wow,.. makan daging steak, gizinya tinggi. Tidak mesti begitu," tuturnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H. Kayan

Pria yang sudah dua periode sebagai pimpinan dewan itu meminta agar pembuat program kebijakan untuk berhati-hati. Dengan begitu, program tersebut tidak hanya seremonial saja. "Simbolis ada. Program ini ada, sosialisasi ada. Tidak ada tindak lanjut. ya akhirnya program itu keluar anggaran. Kumpulin massa, foto-foto, massa akhirnya bingung," bebernya.

Kayan berharap dalam kegiatan sosialisasi program pengendalian kependudukan masyarakat perlu juga melibatkan warga untuk diberikan pelatihan. Setelah diadakan pelatihan, diharapkan bisa merekrut masyarakat lain hingga terbentuk kelompok-kelompok penyuluhan.

Nantinya tiap kelompok sosialisasikan makanan-makanan yang mudah didapat, tetapi gizinya tinggi. "Jadi ada pelatihan untuk mengubah mindset, merubah perilaku, budaya," paparnya. Ia meminta pemerintah agar dalam membuat program penurunan angka penderita stunting tidak hanya seremonial saja. Namun program tersebut harus terprogram dan terorganisasi dalam waktu panjang, sehingga masyarakat memahami tindak lanjut yang harus dilakukan usai diberi sosialisasi pencegahan stunting.

Permasalahan stunting hingga kini masih menjadi perhatian semua pihak, termasuk media. Untuk itu Ketua PWI Sidoarjo Mustain pun mendukung upaya penanganan stunting dari Pemkab Sidoarjo dengan melibatkan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di masing-masing RT.

Mustain mengatakan, pencegahan stunting harus menjadi perhatian semua pihak termasuk media. Hal tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dengan memberikan pemahaman masalah kesehatan, khususnya bahaya stunting pada anak.

“Laporan yang kami terima kasusnya sudah tidak terlalu banyak. Namun, pencegahan perlu ada sejak dini. Jangan saat kasus banyak baru ada penanganannya lagi. Pencegahan stunting sudah secara berjenjang. Termasuk dengan melibatkan pihak sekolah sebagai pusat pencegahan sejak dini untuk kasus stunting di Sidoarjo dan sekarang DPRD Sidoarjo berkolaborasi dengan media untuk edukasi ke masyarakat, kami siap dukung,” jelasnya.

Zonajatim.com

Hal senada disampaikan Kepala PPPA dan KB Kabupaten Sidoarjo Heni Kridtiani S. Pd. M M. Menyampaikan bahwa pengendalian penduduk, Pemerintah telah memperkenalkan program Keluarga Berencana (KB), kemudian undang undang tentang pernikahan, namun di masyarakat masih terjadi fenomena pernikahan dini sehingga memicu banyak perceraian dini pula serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, masalah stunting, masalah status kelahiran anak, hal tersebut menjadi perhatian kita bersama, ungkapnya.

Heni Kristiani S.pd MM, menyampaikan bahwa pengendalian penduduk, Pemerintah telah memperkenalkan program Keluarga Berencana (KB), kemudian undang undang tentang pernikahan. “Meski demikian, masyarakat masih terjadi fenomena pernikahan dini sehingga memicu banyak perceraian dini pula serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, masalah stunting, masalah status kelahiran anak, hal tersebut menjadi perhatian kita bersama, makanya kami senang karena pak Kayan selaku pimpinan DPRD Sidoarjo mengajak media untuk ikut memberikan edukasi ke masyarakat melalui pemberitaan di medianya masing-masing,” pungkasnya. sp/adv

Zonajatim.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DAERAH

Plt. Bupati Dampingi Menko Pangan Meninjau Program Cek Kesehatan Gratis

Heri Margo 10 Februari 2025



SIDOARJO | Suaralintasindonesia.com "Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas pemerintah resmi dimulai pada bulan Februari 2025. Termasuk di Kabupaten Sidoarjo.

Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan peninjauan langsung di Puskesmas Taman, Sidoarjo, Senin (10/2).

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Program cek kesehatan gratis diberikan kepada semua masyarakat tanpa terkecuali, dan dapat melakukan pemeriksaan di puskesmas terdekat tanpa perlu membayar biaya apapun.

Cek kesehatan gratis merupakan inisiatif dari pemerintah mendorong masyarakat melakukan deteksi dini berbagai penyakit untuk meningkatkan potensi kesembuhan.

"Mencegah itu lebih bagus, masyarakat perlu secara rutin untuk cek kesehatan agar kedepannya dapat mengambil langkah-langkah preventif jika terdapat suatu penyakit di tubuh kita. Jika kita sakit, biaya akan semakin mahal dan akan mengurangi produktifitas kita nantinya," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Menko Pangan juga menjelaskan Program cek kesehatan gratis ini diperuntukkan tiga kategori. Pertama, untuk masyarakat yang sedang berulang tahun, mulai bayi hingga lansia. Kedua, untuk anak sekolah terutama di saat ajaran baru, dan ketiga, cek kesehatan gratis diperuntukkan untuk ibu hamil dan balita.

"Program cek kesehatan gratis ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk masyarakat yang berulang tahun pada bulan Februari ini. Selain itu juga, cek kesehatan gratis pada saat tahun ajaran baru dan ibu hamil sesuai jadwal di puskesmas dan posyandu. Satu Sehat, Semua Sehat," tuturnya.

Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi berharap program cek kesehatan gratis tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Sidoarjo. Sebab, selain tanpa biaya, cek kesehatan gratis dapat menjadikan masyarakat hidup lebih sehat.

"Diharapkan masyarakat Sidoarjo tidak ada lagi ada yang sakit, tidak terurus, dan selalu dalam keadaan sehat. Dan semoga program ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman," tutur H. Subandi. (Hr)

Peninggau HPN 2025, Kominfo Bemarap Wartawan Semakin Profesional

by RadarJatim — 10 Februari 2025 | In Layanan Publik, Literasi, Sains/Budaya/Hiburan

0



38

views



SIDOARJO (RadarJatim.id) — Suasana penuh keakraban terasa di Balai Wartawan Sidoarjo, Senin (10/2/2025), saat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo menggelar tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sekaligus merayakan HUT ke-79 PWI.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadis Kominfo) Sidoarjo, Noer Rochmawati, didampingi Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Muhammad Wildan serta Kasi Humas Polresta Sidoarjo, Iptu Tri Novi Handono.

Tak hanya itu, puluhan wartawan dari berbagai media di Sidoarjo juga turut hadir, menikmati kebersamaan sambil berbincang santai.

Ketua PWI Sidoarjo, Mustain, mengatakan bahwa HPN ini menjadi momen refleksi bagi para insan pers agar semakin profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik.

"Kami ingin PWI Sidoarjo bisa terus memberikan kontribusi positif untuk kemajuan daerah," tandas Mustain.

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan HPN 2025, PWI Sidoarjo juga akan menggelar bakti sosial (Baksos) pengobatan gratis pada 20 Februari 2025 dan turnamen E-sport tingkat SMA pada 26 Februari 2025.

"Kami ingin terus memperkuat kebersamaan. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan mendukung acara ini," tambahnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Noer Rochmawati yang hadir mewakili Plt Bupati Sidoarjo,

Subandi, menegaskan bahwa pers adalah pilar penting demokrasi yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

"Di era informasi yang bergerak cepat, wartawan harus semakin profesional dan bertanggung jawab dalam menyampaikan berita," ujarnya.

Noer juga menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan berharap insan pers bisa memberitakan dengan berimbang agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan mencerahkan.

"Semoga sinergi antara pers dan pemerintah terus berjalan dengan baik," harap Bu Ima, panggilan karib Noer Rochmawati.(mad)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Operasi Semeru dimulai, Plt. Bupati Sidoarjo imbau warga tertib berlalu lintas

newsmemojatim Februari 10, 2025



Plt Bupati Sidoarjo, H.Subandi bersama Kapolres Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2025 di halaman Mapolres Sidoarjo, Senin (10/2/25).

SIDOARJO | Operasi Kepolisian Kewilayahan Keselamatan Semeru 2025 resmi dimulai pada Senin, 10 Februari 2025. Selama 14 hari ke depan, operasi ini akan mengintensifkan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2025 digelar oleh Polresta Sidoarjo di halaman Mapolres Sidoarjo, Senin (10/2/25). Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, turut hadir dalam kegiatan tersebut.



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2025 di halaman Mapolres Sidoarjo, Senin (10/2/25)

Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi menyatakan dukungannya terhadap program ini dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang Idulfitri 1446 H Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa tertib berlalu lintas harus selalu dipatuhi, tidak hanya demi keselamatan diri sendiri, tetapi juga demi keselamatan pengguna jalan lainnya.

"Saat berkendara, kita harus mematuhi aturan lalu lintas, seperti memakai helm dan tidak berboncengan lebih dari dua orang. Jika aturan ini diikuti, insyaallah keselamatan di jalan akan lebih terjaga," ujarnya.



H. Subandi juga mengimbau warga Sidoarjo untuk melengkapi surat-surat berkendara, terutama SIM yang wajib dibawa saat mengemudi. Ia menegaskan bahwa mereka yang belum memiliki SIM sebaiknya tidak berkendara dan segera mengurusnya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Bagi anak-anak kita yang belum memiliki SIM, tentunya jangan mengendarai sepeda motor," pesannya.

Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, menyampaikan bahwa dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025, sebanyak 307 personel gabungan diterjunkan di Kabupaten Sidoarjo. Selain melibatkan Polresta Sidoarjo, operasi ini juga mendapat dukungan dari Kodim 0816 Sidoarjo, Satpol PP Sidoarjo, serta Dinas Perhubungan Sidoarjo. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaannya.

"Kami akan lebih mengedepankan upaya preventif dan preemtif, yang mencakup 80 persen dari total kegiatan. Langkah represif tetap dilakukan, tetapi menjadi opsi terakhir," jelasnya.

Baca Juga [Plt Bupati Subandi minta segera tangani tanah amblas di desa Prambon](#)

Kapolresta menambahkan bahwa sosialisasi keselamatan berlalu lintas akan terus digencarkan selama operasi berlangsung. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Mengingat tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Sidoarjo, diharapkan operasi ini dapat menekan jumlah insiden yang terjadi.

"Hindari penggunaan knalpot brong dan selalu pakai helm berstandar SNI. Ini semua demi keselamatan kita bersama," pungkasnya.(git)

